

Implementasi E-Government Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dengan Model Government to Government (G2G) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Oleh:

Intan Nical Wahyu Tifany

Ilmi Usrotin Choiriyah

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2025



Pendahuluan

E-Government

Penggabungan Good Governance dan sistem teknologi yaitu electronic government (e-government). Pemerintah Indonesia mengimplementasikan e-governmet sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

G2G (Government to Government)

interaksi dan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan layanan publik. G2G nasional memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara langsung antar pemerintah, baik di tingkat lokal maupun

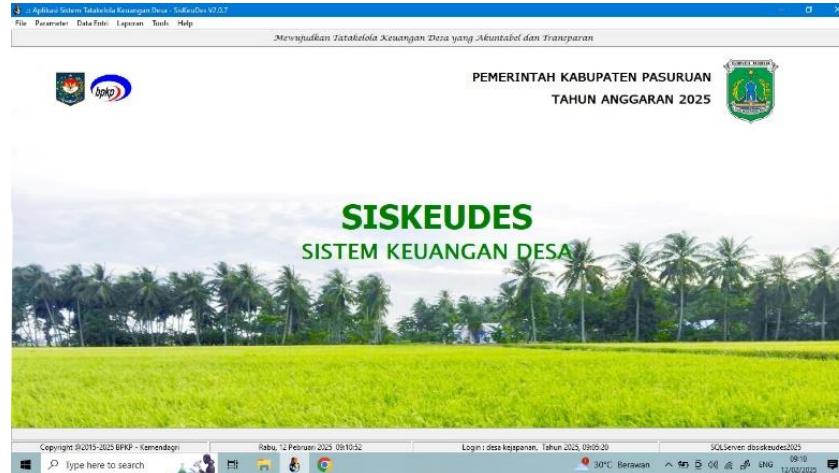
Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

Aplikasi penting dalam pengelolahan anggaran. Dengan bertanggung jawab dalam membuat dan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), alokasi dana desa, termasuk Dana Desa, Dana Alokasi Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil. Mengevaluasi Konsistensi Alokasi Anggaran dengan Rencana Kerja Desa (RKPDesa).

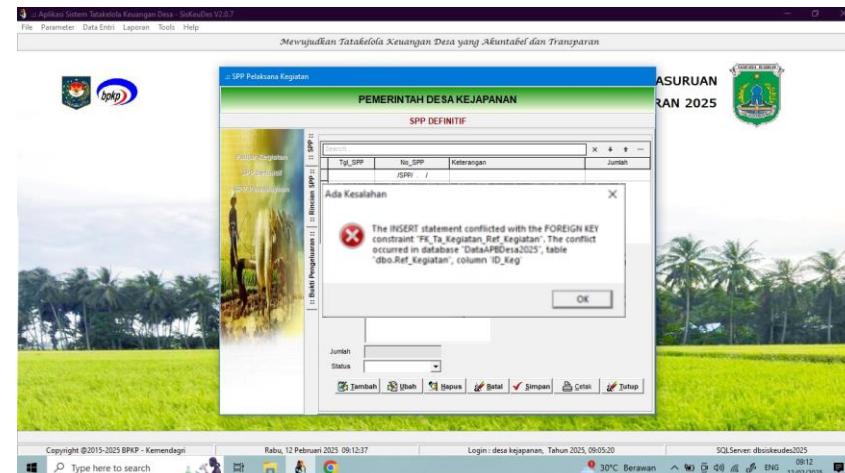
Implementasi

Implementasi adalah proses yang terencana dan terorganisir, melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya, untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan dan menghasilkan dampak yang diinginkan bagi masyarakat atau kelompok sasaran.

Pendahuluan



Gambar.1 Tampilan Awal SISKEUDES

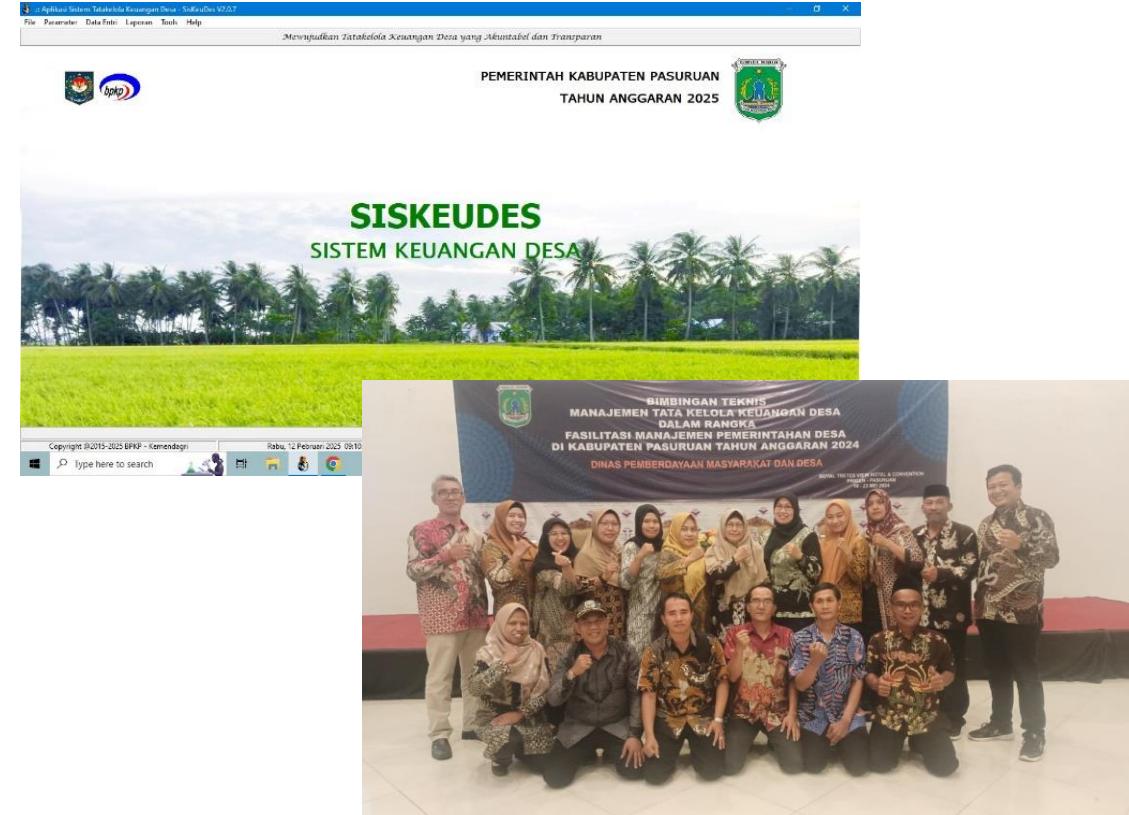


Gambar.2 Tampilan SISKEUDES saat terjadi eror

Pada Gambar.1 diatas menunjukkan tampilan awal aplikasi SISKEUDES yang menjadi suatu trobosan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat keuangan lokal. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai PERMENDAGRI No. 113 dan 114 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari Aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES dirancang dalam hal penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan dengan bertujuan menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dan membantu dalam mengolah data. Namun, Gambar.2 menunjukkan terkadang juga terjadinya eror pada aplikasi SISKEUDES.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

BAGAIMANA IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES (SISTEM KEUANGAN DENGAN) DENGAN MODEL GOVERNMENT TO GOVERNMENT (G2G) DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL ?



Penelitian Terdahulu

Bram Ramadhan, Hendarti Tri Setyo Mulyani dan Medinal (2023) yang berjudul “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Desa Pangkal Buluh”.

Angger Grindo Hargoro, (2023) dengan judul “Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES Di Desa Wanengpaten Kebupaten Kediri”.

Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh Umar Bahlamar dan Hendra Sukmanad, (2023) dengan judul “Efektivitas Model Government to Government (G2G) Melalui SISKEUDES”

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa masih ada permasalahan pada Aplikasi SISKEUDES yang sering terjadi yaitu aplikasi eror



Metode

Janis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terkait dengan implementasi SISKEUDES dengan model Government to Government di Desa Kepanan Kecamatan Gempol.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Pendekatan Teori

Penelitian ini teori implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) menurut Subarsono (2010:101) yang terdiri dari 4 indikator yaitu : kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi dan karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana.

Teknik Pengumpulan Informan

Menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan yang terlibat langsung

Sumber Data

- Data Primer
- Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya

Teknik Analisis Data

Penganalisisan data yang telah didapat pada saat dilapangan yaitu menggunakan empat komponen Miles & Huberman yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyampaikan data dan menarik sebuah kesimpulan



Pembahasan

Implementasi SISKEUDES di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa variable menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

- Kondisi Lingkungan

Desa Kejapanan yang berwilayah di dataran rendah dengan luas $\pm 3,2 \text{ km}^2$ atau $\pm 326,9 \text{ ha}$ dengan koordinat antara 112,8 LU dan 7,5 BT dengan jangkauan menuju kecamatan bisa ditempuh selama 5 menit. Lalu, jarak ke ibukota kabupaten ditempuh sekitar 24 km selama 60 menit. Kondisi ini menjadi relevan ketika kondisi lingkungan dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Kecepatan jaringan internet sebesar 50Mbps serta daya listrik sebesar .

Aplikasi SISKEUDES sendiri kerap mengalami eror atau gangguan teknis, baik saat dibuka maupun akan menginput data. Hambatan ini tidak hanya mengganggu administrasi tetapi juga berdampak pada semangat kerja dan akurasi pelaporan keuangan desa

Selain faktor Geografis yang mencakup wilayah serta jaringan internet terdapat faktor sosial budaya yang tidak dapat diabaikan. Resistensi terhadap sistem digital yang minim karena masih kuatnya praktik-praktik administrasi secara manual yang sudah turun menurun. Pemahaman masyarakat maupun perangkat desa terhadap pentingnya trasparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga masih beragam. Di Desa Kejapanan praktik mencetak banner informasi penggunaan dana desa merupakan bentuk nyata masih kuatnya ketergantungan pada sistem manual

Pembahasan

- Hubungan Antar Organisasi

Di tingkat desa, pelaksanaan SISKEUDES melibatkan beberapa aktor utama yang membentuk sistem kerja yang saling terkait. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta Kaur/Kasi teknis lainnya. Mereka harus berkoordinasi dalam menyusun anggaran, mencatat realisasi, dan menyusun laporan keuangan melalui sistem SISKEUDES. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memegang peran penting sebagai pengawas pelaksanaan APBDes, termasuk penggunaan SISKEUDES, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan BPD harus terjalin dengan baik untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan keuangan.

implementasi SISKEUDES dengan model Government to Government menurut teori Implementasi kebijakan dikatakan belum optimal. Dalam hal ini Bimbingan Teknis (BIMTEK) oleh DPMD sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia desa dalam pengelolaan aplikasi SISKEUDES, tantangan koordinasi dan komunikasi antar organiasi masih tetap terjadi. Adanya perbedaan panduan teknis antara DPMD dan Inspektorat khususnya dalam pengenakan pajak pengadaan sembako untuk masyarakat. Kebingungan yang dihadapi operator menunjukkan belum adanya kesepahaman yang utuh antar lembaga terkait. Serupa juga yang disampaikan oleh Kepala Desa Kejapanan yang mengeluh akan lambatnya sistem pembaruan SISKEUDES terhadap program baru dari pemerintah pusat.



Pembahasan

- Sumber daya Organisasi

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sebuah kebijakan cenderung tidak akan berjalan efektif, meskipun secara perencanaan telah disusun dengan baik. Di desa Kejapanan yang menjadi lokasi penelitian memiliki ketersediaan sumber daya manusia (SDM), perangkat pendukung serta kapasitas finansial yang dikelola oleh desa. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam pencapaian good governance.

Terdapat 3 perangkat desa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana (S1), terdapat 1 orang yang telah menempuh pendidikan diploma (D3), sementara lainnya lulusan pendidikan menengah atas (SMA). Meskipun demikian, belum meratanya tingkat pendidikan di seluruh jajaran perangkat menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kompetensi teknik, khususnya dalam mengoperasikan SISKEUDES yang berbasis digital.

Sumber daya organisasi dalam pemerintahan desa tidak hanya mencakup kualitas sumber daya manusia dan perangkat keras yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh seberapa besar efektif pendanaan desa dikolaborasi untuk mendukung operasional, pelayanan serta membangun masyarakat. Sementara dari aspek pendanaan di tahun 2024 Desa Kejapanan memiliki anggaran yang relatif cukup besar dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/ kota dan sumber pendapatan lainnya.

Pembahasan

- Kemampuan Agen Pelaksana

Dalam implementasi aplikasi SISKEUDES yang di operatori oleh ibu Dian Astari R.A.Md yang selain menjadi operator juga menjabat sebagai Kasi pemerintahan dan Plt Kasi Kesejahteraan. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas kerja dalam hasil wawancara secara praktiknya tugas sebagai operator membutuhkan konsentrasi, keakuratan dalam pengelolaan sistem keuangan desa secara digital menggunakan aplikasi SISKEUDES serta memerlukan keahlian teknis.

Diterangkan oleh Kepada desa yang memilih Ibu Dian Astari R. A. Md sebagai Operator SISKEUDES karena kemampuan beliau yang di rasa cukup dapat menghandle 2 pekerjaan sekaligus. Dikarenakan Desa Kejapanan yang memiliki penduduk dengan jumlah cukup besar sekitar 25.000 jiwa dengan jumlah 152 RT, 27 RW dan 12 Dusun. Sehingga mengedepankan pelayanan serta adanya keterbatasan anggaran untuk menggaji staff yang khusus untuk SISKEUDES.

Desa Kejapanan menunjukkan karakteristik internal yang efisien dan kolaboratif. Kepala Desa menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif melalui inisiatif pelatihan dan rapat rutin setiap hari Jumat yang dibiayai melalui urunan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan budaya kerja seperti ini tidak hanya menunjukkan adanya kekompakan internal, tetapi juga kemampuan adaptasi dan komitmen terhadap pelayanan publik. kendala teknis dalam pelaksanaan tugas sering terjadi seperti kasus operator SISKEUDES yang lupa dan terkendala biaya jika harus adanya operator khusus untuk mengoperasikan SISKEUDES. Hal ini menandakan perlunya peningkata kapasitas teknis secara berkelanjutan serta perencanaan biaya yang lebih.



Hasil

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas terkait implementasi Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di Desa Kejapanan melalui pendekatan model Government to Government (G2G) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol yang dianalisis berdasarkan 4 variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan oleh G. Shabbir Chemma dan Dennis A. Rondinelli (1983) yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

1. Lingkungan fisik dan sosial Desa Kejapanan cukup mendukung implementasi SISKEUDES dengan infrastruktur jaringan internet dan listrik yang relatif stabil namun masih di temukan hambatan akses infrastruktur TIK seperti terjadi gangguan teknis (listrik padam dan sistem yang eror) selain itu belum sepenuhnya optimalisasi dalam digitalisasi terbukti belum adanya web desa dan dalam transparansi masih manual yaitu pencetakan benner.
2. Hubungan antar organisasi terdapat kendala yaitu koordinasi antar instansi baik internal desa maupun lembaga eksternal seperti DPMD, inspektorat dan KPP belum berjalan maksimal dengan ditemukannya perbedaan panduan teknis antara instansi terkait sehingga membingungkan operator SISKEUDES di Desa Kejapanan. Hal ini belum menunjukkan kesetaraan komunikasi dan koordinasi antar lembaga sebagai wujud penting berhasilnya implementasi kebijakan.
3. Sumber daya organisasi di Desa Kejapanan memiliki sumber daya yang baik. Baik dari sisi SDM, sarana prasarana dan anggaran.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Struktur organisasi pemerintahan desa telah sesuai regulasi, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Operator SISKEUDES merangkap beberapa jabatan sehingga beban kerja menjadi berat dan berpotensi menurunkan akurasi serta efisiensi kerja. Meskipun demikian, semangat kolaboratif dan gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa menciptakan budaya kerja internal yang positif. Kegiatan pelatihan rutin yang didanai secara swadaya menunjukkan adanya komitmen pelaksana.



Temuan Penting Penelitian

- Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti Genset yang tidak dapat bekerja secara optimal sebagai penanggulangan apabila terjadinya mati lampu sewaktu-waktu
- Sering terjadinya Aplikasi Trouble
- Operator SISKEUDES hanya 1 orang saja tanpa adanya pengganti
- Komunikasi antar pemerintah yang kurang efektif dan efisien sehingga sering terjadi miscommunication.

Manfaat Penelitian

- Bagi Pemerintah Desa Kejapanan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung berupa infrastruktur yang memadai serta kolaborasi internal, tetapi juga mengidentifikasi hambatan seperti eror sistem, padam listrik, perbedaan teknis antar instansi, dan beban kerja operator.



Referensi

- [1] A. R. Nur Azizah and F. U. Najicha, "Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government," *Law, Dev. Justice Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 237–247, 2022, doi: 10.14710/ljr.v5i2.17225.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Indonesia, 2014, pp. 1–99. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU_Nomor_30_Tahun_2014.pdf
- [3] S. Febrianti Rima, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) desa Harus," *J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 7, no. No.1, pp. 395–406, 2024, [Online]. Available: [https://jurnal.stiatablong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/990](https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/990)
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia, 2016, pp. 45–54. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU_Nomor_06_Tahun_2014.pdf
- [5] Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Indonesia, 2018, pp. 1–120. [Online]. Available: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf
- [6] P. P. Bagiada and M. Hadi, "Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *METHOMIKA J. Manaj. Inform. dan Komputerisasi Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 278–289, 2023, doi: 10.46880/jmika.vol7no2.pp278-289.
- [7] Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Indonesia, 2003, pp. 1–21. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Download/139159/INPRES_NO_3_TH_2003.pdf
- [8] P. Wuri, "telah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunanya. Tidak terkecuali pemerintah yang memanfaatkan," *Anal. Tingkat Implementasi E-government Pada Lev. Kementeri. Indones. Berdasarkan Framew. DELOITTE TOUCHE*, pp. 134–139, 2002, [Online]. Available: www.ecitizen.gov.sg
- [9] B. F. Auliantari, E. Indriani, and Y. Mariadi, "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Di Desa Jatisela," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 416–433, 2022, doi: 10.29303/risma.v2i3.255.
- [10] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)." [Online]. Available: <https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/pY/sistem-keuangan-desa-siskeudes>
- [11] Kementerian Dalam Negeri, *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Indonesia, 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/102690/Permen-No.113-TH-2014.pdf>



Referensi

- [12] Kementerian Dalam Negeri, *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Indonesia, 2014, pp. 1689–1699. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/102691/Permen-No.114-TH-2014.pdf>
- [13] Kementerian Dalam Negeri, "Jumlah Desa Pengguna Aplikasi Siskeudes," satu data pemerintahan dalam negeri. Accessed: Feb. 04, 2024. [Online]. Available: <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1403/tabel-data>
- [14] A. Rivan and I. Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Adm. J.*, vol. 9, no. 2, pp. 92–100, 2019, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487> <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- [15] W. A. Winarno, "Selayang Pandang Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes," *Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur*. [Online]. Available: <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/23>
- [16] S. R. Renita Amelia, Ihyani Malik, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kantor Desa Moncobelang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa," *Kimap Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 2, no. 4, pp. 1318–1331, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index%0AIMPLEMENTASI>
- [17] A. G. Hargoro, P. Studi, M. Administrasi, F. Ilmu, I. Politik, and U. Kadiri, "Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri," *Strukt. J. Ilm. Magister Adm. Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 88–98, 2023, doi: <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1624>.
- [18] I. U. Choiriyah, A. R. U.B, and H. Sukmana, "The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 11, no. 1, pp. 48–56, 2023, doi: [10.21070/jkmp.v11i1.1750](https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1750).
- [19] A. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- [20] F. R. Fiantika and E. Mouw, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. March. Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- [21] B. Bao, H. V. Ayomi, H. Bakri, and P. Ndibau, "Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura," *J. Educ.*, vol. 5, no. 2, pp. 4147–4157, 2023, doi: [10.31004/joe.v5i2.1113](https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1113).





DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI